

**PENERAPAN STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN STRUKTURAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik S.AP*



Oleh:

EPIANDRI ANISA

NIM. 19042121

DEPARTEMEN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

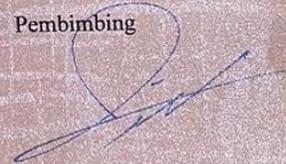
2024

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Penerapan strategi pemerintah kabupaten pesisir selatan dalam mengatasi kemiskinan struktural
Nama : Epiandri Anisa
NIM/TM : 19042121/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Februari 2024

Disetujui oleh
Pembimbing



Rizki Syafril, SHL., M.Si

NIP. 198712032019031008

PENGESAHAN LULUS UJIAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat, 26 Februari 2024 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

Penerapan Strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural

Nama : Epiandri Anisa
NIM/TM : 19042121/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Februari 2024

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Rizki Syafril, SHI.,M.,Si	1. 
Anggota	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP.,M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D.
NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epiandri Anisa
NIM/TM : 19042121/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Epiandri Anisa
19042121

ABSTRAK

EPIANDRI **Penerapan Strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**
ANISA **dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural**
19042121

Strategi Kemiskinan struktural dipesisir Selatan menjadi masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia yang paling terkait dengan masalah kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural dipesisir Selatan . strategi ini menjadi jangka Panjang untuk mencapai tujuan yang akan dijalankan. pada umumnya kemiskinan struktural adalah suatu keadaan yang dialami Masyarakat yang tidak mendapatkan akses untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. kemiskinan ini datang dari luar tetapi keadaan miskin bukan Masyarakatlah yang mau tapi keadaan miskin datang dari struktur kepemilikan tanah dan struktural sosial,yang berdampak juga keturunan mereka saling berkelanjutan. kemiskinan struktural Untuk mencapai kerja sama dan percepatan memerlukan keterlibatan bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktor negara dan non-negara dalam menghadapi tujuan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif ,Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi dan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini dilakukan di bappedalitbang (badan perencanaan daerah penelitian dan pengembangan) kabupaten pesisir selatan, kantor bappedalitbang. penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, Teknik pengumpulan data seperti wawancara, studi dokumentasi, Dalam teknik penelitian kualitatif Teknik analisis data digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber, yang terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari tahap reduksi data hingga penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemiskinan struktural sebagai fenomena kompleks memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan model intervensi yang berkelanjutan dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu kerangka kerja yang dapat menjadi dasar bagi strategi intervensi yang lebih baik dalam mengatasi kemiskinan struktural,memiliki strategi P3KE yang akan membantu mengupayakan kemiskinan daerah kabupaten pesisir Selatan, dengan hal tersebut penanganan masalah kemiskinan struktural tersebut tidak dapat dilakukan dengan satu elemen saja akan tetapi membutuhkan kerja sama yang intens dalam pelaksanaannya, dan strategi memberikan arah untuk melaksanakan suatu program agar bisa dicapai.

Kata Kunci: strategi ,mengatasi, kemiskinan struktural.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahminirrahim, Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Penerapan Strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga laporan ini diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Soslai Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Rizki Syafril,SHI.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran yang membangun serta membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
5. Kepada Ibu Dr. Lince Magriasti,S.IP., M.Si Sekalu dosen pembimbing akademik (PA) selama penulis mengikuti perkuliahan di universitas negeri padang dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik saran dan masukan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak Adil Mubarak S.IP., M.Si Sekalu Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik saran dan masukan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis
8. Staff karyawan dan karyawan keputakaan dan staff administrasi jurusan Ilmu Administrasi Negara serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
9. Bapak Ketua Badan perencanaan daerah penelitian dan pengembangan kabupaten pesisir Selatan dan seluruh pegawai bapeddalitbang pesisir selatan selaku informan kunci dalam penelitian ini
10. Untuk Orang Tua tercinta , Ayah Ardiwen Ade Putra dan, Ibu Yuli Susanti yang selalu memberi dukungan dan doa yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai saat ini.

11. Dan adik-adik ku tercinta Roni, Syofia , Zahyra , Zafran yang telah memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
12. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara 2019
13. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Denisya Azhura rekan seperjuangan serta teman dan patner dalam segala hal dalam mensupport penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Iffa, Mutia, Farida, Ayu, Antika, mereka rekan seperjuangan dalam mensupport penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini
15. Terima kasih yang sangat dalam untuk diri sendiri karena telah mampu bertahan dan menyemangati diri ini . Big hug for me.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaratuh.

Padang, 05 Februari 2024

Epiandri Anisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	25
C. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Informan Penelitian	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
G. Uji Keabsahan Data.....	35

H.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Temuan umum	38
1.	Gambaran umum badan perencanaan daerah Pembangunan daerah pesisir Selatan	38
2.	Visi dan Misi badan perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan	40
3.	Tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah	41
B.	Temuan Khusus	51
1.	Penerapan Strategi Pemerintah kabupaten pesisir selatan Dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural	51
2.	Kendala yang dihadapi	59
C.	Pembahasan	61
1.	Tujuan	81
2.	Perencanaan	81
3.	Pelaksanaan	82
BAB V PENUTUP		84
A.	kesimpulan	84
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 2. Struktur organisasi bappedalitbang	51
Gambar 3. Kebijakan dan strategi pemerintah pusat dan daerah.....	52
Gambar 4. Jumlah penduduk menurut kecamatan kabupaten pesisir selatan.....	58
Gambar 5. Persentase pengeluaran kabupaten pesisir Selatan 2022-2023.....	64
Gambar 6. Peningkatan pendapatan pesisir Selatan 2022-2023.....	65
Gambar 7. Mengurangi wilayah kantong kemiskinan kabupaten pesisir Selatan.	66
Gambar 8. Rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Mitra Mandiri Presentase jumlah penduduk miskin kab. Pesisir Selatan tahun 2013- 2022.....	07
Tabel 2. Informan Penelitian.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perekonomian yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterkaitan dengan masalah kemiskinan. Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan tepat sasaran, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa dalam kemiskinan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan Kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Mengatasi kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan.

Menurut Suparlan (1984) kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.

Menurut Selo Soemardjan (1980) kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Berbagai konsep mengenai kemiskinan yang ditawarkan dan diperdebatan berlangsung memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Menurut penulis kemiskinan struktural adalah suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat yang tidak mendapatkan hal akses untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kemiskinan ini datang dari luar, artinya keadaan miskin bukan masyarakatlah yang mau tetapi keadaan miskin datang dari struktur kepemilikan tanah dan struktur sosial masyarakat. kondisi miskin berdampak juga keturunan mereka yang saling berkelanjutan.

Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan tepat sasaran, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Bupati, agar daerah mampu melakukan:

1. Analisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan,
2. Penyusunan Anggaran yang efektif dalam upaya memberantas kemiskinan,
3. Koordinasi dan pengendalian program-program upaya memberantas kemiskinan.

Agar kebijakan dan program strategi mengatasi kemiskinan terpenuhi ditingkat daerah pemerintah melalui perpres No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan seperti mengurangi beban pengeluaran Masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kredit, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan itu bisa dikategorikan kemiskinan pada umumnya dan kemiskinan struktural, faktor-faktor penyebab kemiskinan umum yaitu faktor Sosial yang kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin rendahnya kualitas sumber daya manusia motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Namun faktor yang menjadi kemiskinan struktural bisa dilihat dari segi kemiskinan yang biasanya seperti sektor

Perkebunan atau pertanian dan Pendidikan. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan menjadikannya sebagai masalah yang dialami oleh banyak negara, tidak hanya Indonesia.

Kemiskinan struktural akan ditunjukkan melalui unsur-unsur pokok tersebut dimana ketika kemiskinan struktural terjadi pada masyarakat, terdapat perubahan kondisi yang terjadi disebabkan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. kemiskinan struktural menjadi penting dalam kaitannya dengan upaya mengatasi ketimpangan yang selama ini terjadi pada masyarakat kelas bawah. Kemiskinan struktural Melakukan kolaborasi dan akselerasi membutuhkan keterlibatan multi pihak baik pemerintahan dan non pemerintahan secara bersama tentu akan sangat membantu dalam mencapai tujuan. di Pesisir Selatan Kemiskinan skruktural ini bisa membentuk keluarga miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.

Bagi masyarakat yang berada pada kawasan perkebunan, kemiskinan struktural muncul dengan dibuktikan melalui terpuruknya perekonomian masyarakat yang semula memiliki akses terhadap sumber daya lahan. Sebagai akibat pengambil alihan lahan secara paksa oleh perkebunan, kehidupan petani menjadi menurun sekaligus memunculkan ketimpangan akses sumber daya lahan. Memahami kemiskinan struktural merupakan upaya untuk memahami struktur masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada akumulasi fokus kajian pada bagaimana struktur masyarakat dapat melahirkan kondisi kemiskinan struktural.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan , Yudi Yos Elvin menyampaikan sebagaimana yang diungkapkan bahwa :

“..kemiskinan struktural ini bisa berpotensi bakal melahirkan keluarga miskin selanjutnya, dan tingginya angka putus sekolah, khususnya pada keluarga kurang mampu dapat memicu kemiskinan struktural tinggi. sehingga upaya pengentasan kemiskinan yang digagas pemerintah kabupaten tidak akan tercapai secara maksimal, data BPS sepanjang 2021- 2022 tingkat persentase penduduk miskin di daerah berjuduk ' Negeri Sejuta Pesona ' itu mencapai 7,92 -7,11 persen, dengan garis kemiskinan 525,36 ribu jiwa. populasi penduduk miskinnya sebanyak 33.78 jiwa. Angka itu merupakan tertinggi di Pesisir Selatan sejak 2017. Capaian tersebut juga tercatat ketiga tertinggi di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat’ .

Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar 1,48 persen dari tahun 2022 yang berjumlah 517.715 ribu jiwa. Selama satu dekade terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan bertambah sebanyak 82,67 ribu jiwa atau meningkat sebesar 18,68 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017. Komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh laki-laki. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pesisir mencatat total anak yang tak sekolah yang terdampak miskin mencapai 5.988 orang. Ada beberapa kecamatan yang bisa memicu potensi kemiskinan struktural seperti Bayang, Lumbo, Lagan, Lengayang. Masih banyak penduduk usia 15 tahun atau lebih di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki ijazah SD atau lebih rendah. Pada tahun 2023, persentasenya mencapai 35,81 persen. Tetapi, angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 37,36 persen. Selain itu, penduduk usia 15 tahun atau lebih yang memiliki ijazah SMP atau sederajat pada

tahun 2023 sebanyak 24,03 persen atau turun 1,45 persen dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, penduduk yang memiliki ijazah lebih tinggi mengalami peningkatan. Penduduk usia 15 tahun atau lebih yang memiliki ijazah SMA naik dari 23,40 persen di tahun 2022 menjadi 25,54 persen di tahun 2023. Begitu pula penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 yang naik dari 8,24 persen di tahun 2022 menjadi 8,49 persen di tahun 2023. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah lama dilakukan oleh pemerintah sejak masa awal kemerdekaan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Salah satu aspek penting untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ini adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Data kemiskinan yang dihitung BPS berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS), Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan, dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

**Persentase Jumlah Penduduk Miskin
Di Kab. Pesisir Selatan Tahun 2013-2022**

Tabel 1.1

Tahun	Kemiskinan (Presentase)
2013	8,64
2014	7,82
2015	6,46
2016	7,92
2017	7,79
2018	7,59
2019	7,88
2020	7,61
2021	7,92
2022	7,11

Sumber : BPS 2013-2022

Berdasarkan dokumen SPKPD kabupaten pesisir Selatan 2017-2021, salah satu prioritas pembangunan Pesisir Selatan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD adalah penurunan tingkat kemiskinan. Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arus utama, salah satunya lewat pendidikan. Pemerintah kabupaten menargetkan terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing, upaya itu dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan, pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Salah

satu rencana aksi yang kini telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membebaskan biaya pendidikan pada jenjang SD dan SMP, sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Program itu diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia unggul hingga jenjang pendidikan bagi keluarga kurang mampu. (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini fokus kearah pendidikan, hanya saja penerapan belum maksimal karena:

- 1) Rendahnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- 2) Sulit serta mahalnya biaya pelayanan publik
- 3) Daya saing dunia pendidikan relatif rendah

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam upaya mengatasi kemiskinan ini faktor utamanya adalah pendidikan, karena memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas kerja. Kemiskinan memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan, karena pendidikan mampu memberikan kemampuan untuk berkembang melalui keterampilan dari diri sendiri, maka dari itu semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang menamatkan pendidikan yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut sudah baik. Begitu besarnya peranan pendidikan dalam menentukan kualitas SDM telah mendorong

pemerintah untuk terus berupaya mencari terobosan agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Selain itu, diperlukan pemerataan kesempatan pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan buk Ranti pegawai di Bappeda menyampaikan sebagaimana yang diungkapkan bahwa :

“...Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan memakai peraturan presiden republik indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan seperti dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan , mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi ini sudah diterapkan namun masih ada yang belum semuanya terlaksana. Tapi kebijakan dari pemerintah pesisir Selatan menambahkan kebijakan atau strategi seperti pemanfaatan program ketahanan pangan, meningkatkan akses pelayanan dasar dan pembangunan yang inklusif”

Dari strategi yang telah dijabarkan baru ada lima strategi yang telah dijalankan dan masih ada strategi yang belum terlaksana, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih progresif melakukan percepatan. Menghapuskan kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan beberapa langkah dan kebijakan mendasar telah diformulakan. Antara lain, Proses konsolidasi menyepakati penggunaan satu data dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor di Pesisir Selatan sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan tepat manfaat. Tentunya akan mudah dapat mengetahui siapa saja yang berhasil mengentaskan dari garis kemiskinan, seperti;

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin adalah langkah memastikan setiap sasaran mendapatkan program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial dan program sejenis yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (kurang mampu). Salah satu terobosan yang dilakukan pada tahun ini adalah perluasan cakupan universal health coverage (UHC) kepesertaan BPJS Kesehatan hingga mencapai sebanyak 36.000 jiwa Tahun 2023 bagi masyarakat kurang mampu. Intervensi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat kurang mampu yang selama ini tidak masuk data base sektoral untuk perlindungan sosial.

Meningkatkan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin mendorong akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Hal ini ditujukan agar kapasitas SDM masyarakat miskin dapat lebih meningkat.

Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan strategi kemiskinan, upaya ini sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata mata sebagai obyek pembangunan.pada prinsipnya seperti program bantuan Pendidikan untuk membebaskan pungutan disekolah yang menjadi kewenangan kabupaten sd dan smp ,pemerintah daerah menginginkan agar setiap Masyarakat kurang mampu tidak akan lagi menemui masalah dalam Pendidikan

Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil Upaya ini intervensi program terhadap sektor UMKM tentu juga penting

dilakukan karena makin berkembang sektor UMKM serapan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat. Diantara penyumbang pasar kerja UMKM ini tentu diharapkan berasal dari keluarga miskin yang telah diberdayakan tadi. Peran pemerintah nagari juga sangat penting.

Berikutnya, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan seperti program bantuan pendidikan untuk membebaskan pungutan di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten (SD dan SMP) masih akan terus dilanjutkan. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah menginginkan agar setiap masyarakat kurang mampu tidak lagi akan menemui masalah pemenuhan kebutuhan pokok minimum dan pelayanan dasar kesehatan maupun pendidikan

Pemanfaatan program ketahanan pangan juga akan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin juga akan menjadi solusi. Bantuan benih ternak unggas dan tanaman pertanian adalah salah satu bentuk nyata dari program ini yang sehari – hari hasilnya dapat menambah income mereka. Apalagi mayoritas penduduk miskin berada pada sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya monitoring dan pendampingan juga perlu dilakukan.

Meningkatkan akses pelayanan dasar dan Pembangunan yang inklusif meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur, di bidang pendidikan selain memberikan subsidi/bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, perbaikan terhadap sarana prasarana pendidikan juga menjadi prioritas dengan fokus.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan terkait permasalahan Strategi pemerintah kabupaten pesisir selatan dalam mengatasi

kemiskinan struktural di Pesisir Selatan ini belum berjalan lancar. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Strategi Pemerintah kabupaten [esisir Selatan Dalam Mengatasi Kemiskinan Struktural.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis penulis memberi identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Strategi kemiskinan struktural dipesisir selatan belum berjalan lancar karena masih ada daerah yang bakalan bisa berpotensi kemiskinan yang struktural.
2. Faktor terjadinya kemiskinan struktural dipesisir selatan dari tingkat Pendidikan dan Perkebunan/Pertanian.
3. Program RPJMD yang terfokus pada bidang pendidikan tidak berjalan dengan maksimal dalam mengatasi kemiskinan struktural.

C. Batasan Masalah

Disebabkan karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, maka penelitan ini dibatasi pada bahasan terkait “**strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural dipesisir selatan**”

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini penulis akan fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural di kabupaten pesisir selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang penerapan strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural di Kabupaten Pesisir Selatan

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut;

1. Secara teoritis

Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya dibidang pemerintahan daerah.

2. Secara praktis

- a. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah kabupaten pesisir selatan dalam melakukan kondisi kemiskinan dalam strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang skruktural
- b. Bagi penulis mampu menambah pengetahuan dan wawasan, serta digunakan salah satu untk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Negeri Padang
- c. Bagi masyarakat hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang struktural di Pesisir Selatan.